

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia baru ada di Negara *modern* (Budiarjo, 2008:397).

Di Indonesia, setiap partai politik pasti memiliki basis pendukung yang cukup besar disetiap daerah-daerah tertentu. Seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki basis dukungan yang besar di Provinsi Bali. Tanpa mengesampingkan daerah-daerah lainnya yang juga menjadi basis PDIP, Bali memang menjadi lumbung suara dan dukungan bagi PDI Perjuangan disetiap kali penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. Adanya istilah politik aliran di Bali membuat PDI Perjuangan mampu merajai pulau Bali karena PDI Perjuangan disebut inkarnasi dari PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang merupakan partai yang begitu lekat dengan sang proklamator Indonesia Ir. Soekarno.

Di era orde lama, atau era kepemimpinan presiden Soekarno. Partai yang dipimpin presiden Soekarno yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI) selalu dapat memenangkan pertarungan pemilihan umum di Bali. Itu terjadi karena sosok figur

Soekarno yang merupakan bapak proklamator kemerdekaan Indonesia, dan Soekarno juga secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya memiliki darah bali dimana sang ibu merupakan brahmana dari Singaraja. Selain itu, strategi PNI untuk menggandeng puri satria masuk ke dalam PNI juga berpengaruh dalam kemenangan-kemenangan PNI di bali, meskipun pada pemilu tahun 1955 PNI mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang juga mendapatkan dukungan dari Puri Pemecutan, yang merupakan rival dari Puri Satria. Pada tahun 1955 PNI berhasil memenangkan pertarungan pemilu di Bali dengan menguasai 51,43% suara yang mengungguli PSI dengan perolehan 30,61% suara dan jauh meninggalkan partai-partai lainnya. Dwipayana (2004:101-102)

Kedigdayaan PNI di provinsi Bali terus berlanjut hingga runtuhnya era orde lama yang kemudian digantikan oleh era orde baru. Pada pemilu 1971, perolehan suara PNI anjlok menjadi 6,93%, sedangkan partai Golkar yang dipimpin Soeharto berhasil meraup 62,82% suara dan membuat tongkat pemerintahan Soekarno beralih ke periode orde baru yang dipimpin presiden Soeharto. Pemerintahan orde baru berusaha menyederhanakan partai politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang dibolehkan tumbuh hanya tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI sendiri terbentuk dari hasil gabungan PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik yang merupakan kelompok Nasionalis. Nurjaman (2013:35)

Kehancuran PNI di tingkat nasional berimbas ke daerah-daerah yang menjadi basis PNI seperti provinsi Bali. Dimana PDI tak bisa berbuat banyak di Bali yang merupakan basisnya. Golkar selalu menjadi pemenang di Bali dengan perolehan suara yang sangat mencolok di gelaran pemilu-pemilu berikutnya. Ketika rezim orde baru runtuh, peta perpolitikan di Bali sangat berubah drastis. Dimana Partai Golkar yang dimasa orde baru menguasai pulau Bali mengalami kemerosotan tajam dalam pemilu 1999. Posisi *single majority* yang didapatkan Golkar di pemilu-pemilu orde baru berubah hanya mendapatkan 10,37% suara di Bali. Sebaliknya, PDI Perjuangan yang dalam pemilu-pemilu orde baru tidak pernah meraih suara yang besar berhasil menyapu 79,01% suara pemilih. Penurunan suara Golkar sudah diprediksi sebelumnya, disamping karena Bali pada masa orde baru merupakan basis Partai Nasional Indonesia, tetapi juga disebabkan kultur politik di Bali yang cenderung monolitik. Dominasi PDI Perjuangan Bali terus berlanjut pada gelaran pemilu-pemilu selanjutnya. Dimana pada saat pemilu 2004, 2009, dan 2014 PDI Perjuangan selalu mendominasi perolehan suara di pulau seribu pura tersebut.

Dalam hajatan lokal atau pilkada, PDI Perjuangan masih *superior* dibandingkan partai politik lain di pulau dewata. Dari 9 kabupaten dan kota di provinsi Bali, PDI Perjuangan memiliki 7 wakil di 7 daerah di Bali. Kabupaten/kota yang dipimpin oleh jagoan-jagoan PDI Perjuangan diantaranya adalah kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Buleleng, Bangli, dan Kota Denpasar. Hanya ada 2 kabupaten di Bali yang pemimpinnya bukan diusung dari PDI Perjuangan yaitu Karangasem dan Klungkung. Namun dari mayoritas kabupaten/Kota di Bali yang berhasil dikuasai PDI Perjuangan, Gubernur Bali

bukanlah berasal dari PDI Perjuangan. Cukup ironi memang ketika Bali merupakan basis “tradisional” Partai berlambangkan banteng tersebut justru Gubernurnya bukan berasal dari PDI Perjuangan. Dimana pada perlehatan pilkada 2013 PDI Perjuangan yang mengusung AA Ngurah Puspayoga harus mengakui keunggulan Made Mangku Pastika yang diusung oleh koalisi partai-partai besar di Indonesia seperti Golkar, Gerindra, Demokrat dll.

Sejak diresmikan menjadi sebuah provinsi, dilansir dari Beritabali.com Bali telah memiliki 8 Gubernur yang berbeda. Diantaranya adalah Anak Agung Bagus Sutdja (1950-1958) periode pertama dan (1959-1965), I Gusti Bagus Oka (1958-1959), I Gusti Putu Martha (1965-1967), Soekarmen (1967-1978), Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (1978-1988), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (1988-1993), Drs. Dewa Made Beratha (1998-2008), dan I Made Mangku Pastika (2008-2018). Dua diantaranya merupakan Gubernur yang menjabat di era Reformasi. Drs. Dewa Made Beratha merupakan Gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Begitupun dengan I Made Mangku Pastika yang saat Pilkada 2008 ia diusung oleh PDI Perjuangan berpasangan dengan kader PDI Perjuangan AA Ngurah Puspayoga. Ditahun 2013 PDI Perjuangan mengusung AA Ngurah Puspayoga yang merupakan kader mereka untuk maju mencalonkan Gubernur Bali. Sementara I Made Mangku Pastika kembali mencalonkan diri melalui koalisi partai-partai rival PDI Perjuangan di Bali. Manuver yang dilakukan Pastika terbilang cukup berhasil karena dirinya didukung mayoritas parpol pesaing PDI Perjuangan Bali, selain itu ia juga memiliki “figur” militer yang tersemat dalam dirinya dan pernah menjadi kapolda Bali.

Anak Agung Ngurah Puspayoga bukanlah figur sembarangan didunia perpolitikan Bali. Dirinya merupakan putra bangsawan dari Puri Satria. Dimana AA Ngurah Puspayoga merupakan putra dari Cokorda Bagus Sayoga. AA Ngurah Puspayoga sendiri mulai aktif terlibat di PDIP sejak kongres luar biasa PDI di Surabaya tahun 1996. Dari keterlibatan di kongres itu, Ngurah Puspayoga melanjutkan karir politiknya di PDI sehingga akhirnya terpilih menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar 1999-2000. Karir politik AA Gede Ngurah Puspayoga berlanjut dengan berhasil menjadi Wali Kota Denpasar selama 2 periode (2000-2005) dan (2005-2009). Namun pada periode kedua di tahun 2008 karir AA Gede Ngurah Puspayoga kembali meningkat setelah terpilih menjadi Wakil Gubernur Bali periode (2008-2013) mendampingi I Made Mangku Pastika. Selesai masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mencalonkan diri menjadi Gubernur Bali periode 2013-2018 dengan menggandeng Dewa Nyoman Sukrawan. Sayang, pasangan ini gagal terpilih setelah kalah dari pasangan I Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta.

Kekalahan AA Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan tentu mengejutkan banyak pihak. Tak ada yang memprediksi bahwa jagoan PDI Perjuangan tersebut akan kalah diperhelatan pilkada Bali 2013. Terlebih lagi Bali merupakan Basis PDI Perjuangan dan 7 dari 9 kabupaten di Bali pemimpinnya merupakan jagoan dari PDI Perjuangan. Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak menyangka dan merasa kecewa begitu mengetahui kekalahan PDI Perjuangan di "rumahnya" sendiri. Dilansir dari news.liputan6.com Trimedya Panjaitan yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang hukum PDI

Perjuangan mengatakan kekalahan PDI Perjuangan disebabkan karena terlalu percaya diri menghadapi Pilkada Bali. PDIP terlalu percaya diri, lanjut Trimedya, karena merasa menguasai 7 kabupaten dari 9 total kabupaten di Bali. "Itu kantung-kantung (suara) yang gemuk misalnya Buleleng, Tabanan," ujar dia. Kemudian, menurutnya, setelah kekalahan tersebut, Megawati mengumpulkan 7 bupati dari PDI Perjuangan. Namun, Trimedya tidak mengerti apa agenda Megawati mengumpulkan bupati-bupati itu.

Kekalahan PDI Perjuangan di Pilkada Bali 2013 jelas mencoreng reputasi mereka sebagai partai yang menguasai panggung perpolitikan di Bali. Walaupun di Pemilu 2014 PDI Perjuangan kembali merajai perolehan suara di Bali, begitu juga dengan Pilpres 2014 calon yang diusung PDI Perjuangan yaitu Jokowi-JK berhasil meraih mayoritas suara di Bali. Kesalahan strategi dalam menghadapi pilkada Bali jelas menjadi alasan utama kalahnya AA Gede Ngurah Puspayoga di Pilgub Bali, dimana lemahnya strategi dan aktivitas *public relations* yang dilakukan PDI Perjuangan Bali berakibat fatal. Kini, PDIP Bali tengah bersiap untuk menghadapi pilkada 2018. PDIP mulai menjaring nama-nama kandidat calon gubernur yang akan diusungnya untuk maju ke Pilkada 2018. Dari beberapa calon yang ingin maju untuk menuju Bali satu, pilihan PDI Perjuangan sepertinya mengerucut pada satu nama. Ia adalah I Wayan Koster yang merupakan ketua DPD PDI Perjuangan Bali dan juga anggota komisi V DPR RI. Meski begitu, keputusan untuk mengusung calon gubernur Bali tetap berada di dewan pimpinan pusat (DPP) PDI Perjuangan dan juga ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri. Apalagi kekalahan calon PDI Perjuangan di perhelatan pilkada Jakarta 2017, bisa menjadi

cambuk bagi PDI Perjuangan untuk bekerja lebih keras untuk dapat memenangkan pilkada di beberapa daerah yang akan dihelat tahun 2018.

Dilansir dari Denpostnews.com Wayan Koster telah menyatakan siap maju bertarung di pemilihan calon Gubernur Bali 2018. Penegasan Koster tersebut disampaikan usai menutup rapat kerja daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Bali di hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (23/3). Rakerda dibuka oleh ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan dihadiri sejumlah pengurus PDI Perjuangan seperti sekjen Hasto Kristanto dan pengurus lainnya. Deklarasi Wayan Koster sendiri telah mendapatkan persetujuan dari 8 DPC PDI Perjuangan dari total 9 DPC PDI Perjuangan di Bali. Selain itu, maraknya dukungan dari relawan Koster Bali Satu (KBS) juga menyuntik semangat Wayan Koster untuk mantap bertarung di Pilgub Bali 2018. PDI Perjuangan jelas harus bekerja keras jika ingin memenangkan Koster dalam pilkada 2018, mengingat calon-calon lawan Koster bukanlah figur sembarangan di Bali. Sudikerta yang saat ini menjabat wakil Gubernur Bali bisa jadi lawan terberat Koster mengingat dirinya akan maju melalui partai rival PDI Perjuangan yaitu Golkar. Meskipun Koster mendapatkan dukungan dari relawannya dan mayoritas DPC di provinsi Bali, namun DPP PDI Perjuangan belum melakukan keputusan final apakah Koster akan menjadi calon yang diusungnya. Karena belajar dari kesalahan dimasa lalu, DPP PDI Perjuangan pasti akan melakukan survei secara intensif tentang elektabilitas calon yang akan diusung. Agar reputasi PDI Perjuangan di daerah yang menjadi basis tradisonalnya tak lagi tercoreng untuk yang kedua kalinya.

PDI Perjuangan tak bisa berleha-leha dalam menghadapi Pilgub 2018, mengingat kegagalan pahit yang dialami PDI Perjuangan di Pilgub 2013. Meskipun menguasai kursi di DPRD Bali dan juga menguasai 7 kabupaten di Bali tak lantas membuat PDIP jumawa karena itu bisa menjadi *boomerang* bagi PDIP seperti pilkada 2013.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti mengambil sebuah rumusan masalah. Bagaimana Aktivitas *Public Relations* politik DPD PDI Perjuangan Bali dalam proses konsolidasi internal maupun eksternal partai menjelang pemilihan Gubernur Bali 2018.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang aktivitas *Public Relations* politik DPD PDI Perjuangan Bali dalam upaya konsolidasi menjelang pemilihan Gubernur Bali 2018

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi Ilmu Komunikasi, khususnya yang bergerak pada konsentrasi *Public Relations*. Agar dapat mengetahui bagaimana pentingnya Aktivitas *Public Relations* sebuah Partai Politik dalam menghadapi pesta demokrasi di daerah (Pilkada). Penelitian ini juga dapat

dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DPD PDIP Bali dalam merancang strategi *Public Relations* politik dalam pilgub 2018 dan juga pilgub-pilgub selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi bagi tim pemenang pemilu/pilkada PDIP Bali agar dapat bekerja lebih keras dalam memenangkan calon yang akan diusungnya pada saat pilgub Bali 2018.

